Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/KPT/2019
Volume 20, Nomor 3, September 2020

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

Pembina
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HakAsasi Manusia

Pengarah
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan HakAsasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HakAsasi Manusia
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Pemimpin Umum
Ahyar, S.H., M.H. (Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

Pemimpin Redaksi (Editor)
Ahyar, S.H., M.H.

Anggota Dewan Redaksi (Section Editor)
Marulak Pardede, S.H., M.H.
Mosgan Situmorang, S.H., M.H
Henry Donald Lb. Toruan, S.H., M.H
Nevey VaridaAriani, SH., M.Hum.
Dr. Hardianto Djanggih, S.H, M.H.
Muhaimin, S.H.

Redaksi Pelaksana
Fitriyani, S.H., M.Si.

Sekretariat
Muhammad Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
Dra. Evy Djuniarti, M.H.
Ibnu Prasetyo, S.H.

Penyunting Tata Bahasa dan Naskah (Copyeditor)
Lindung Budi Mulyawan, S.H.
B Lora Christyanti, S.IP.
Amirah Balqis, S.H.
Ardyan Gilang Ramadhan, S.Sos.
Maria Lusyana Br Ginting, S.A.P.

Jurnal Penelitian Hukum
De Jure
Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/KPT/2019
Volume 20, Nomor 3, September 2020
p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Teknologi Sistem Informasi
Machyudhie, S.T.
Mochamad Arip, S.Kom.
Harysandy Permana, S.Kom.
Agus Priyatna, S.Kom.

Mitra Bestari (Reviewer)

1. Dhiana Puspitawati, S.H., L.LM., Ph.D.
   Lektor Kepala / Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
   Malang, Jawa Timur, Indonesia
2. Prof. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.
   Guru Besar / Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
   Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia
3. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
   Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
   Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
4. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
   Guru Besar / Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
   Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Indonesia
5. Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., C.N.
   Lektor Kepala / Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
   Bandung, Jawa Barat, Indonesia
6. Dr. Hadi Supratikta, M.M.
   Peneliti Ahli Utama Administrasi Publik
   Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia

Alamat Redaksi:
Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5, Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

Email:
balitbangkumham@gmail.com
jurnaldejure@yahoo.com
ejournaldejure@gmail.com

Percetakan PT Pohon Cahaya
Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440
Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual di bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritisi, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap di *submit* pada aplikasi *Open Jounal System (OJS)* pada URL/website: ejournal.balitbangham.go.id

Jurnal Penelitian Hukum
De Jure
Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/KPT/2019
Volume 20, Nomor 3, September 2020
p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI iii
ADVERTORIAL v
KUMPULAN ABSTRAK vii

Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh yang Berkeadilan
(The Model for Law Enforcement on Election Crimes in Aceh Province) ..... 289 - 300
Mohd. Din, Rizanizarli, Akbar Jalil

Sifat Putusan Impeachment Mahkamah Konstitusi terhadap Status Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden
(*Constitutional Court of impeachment Decisions on The President's Law Status and/or The Presidential***)** ..... 301 - 314
Farid Wajdi, Andryan

Urgensi Pemberian Paspor Diplomatik Bagi Anggota Parlemen
(*The Urgency of Granting Diplomatic Passport to the Members of the Parliament***)** ..... 315 - 334
I Made Budi Arsika, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati

Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Bidang Perpajakan
(Legal Aspect of Eradication of Corruption Criminal Act in Taxation) ..... 335 - 362
Marulak Pardede

Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter dalam Sistem Peradilan Pidana (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Era Covid-19)
(The Legal Aspect of Doctor's Notes in the Criminal Justice System (Eradication of Criminal Corruption Measures in the Time of Covid-19)) ..... 363 - 378
Suharyo

Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
(Ideal Execution of Civil Law Based on Principles The Justice of Correlation in Efforts to Reach Simple, Fast Justice and Light Fee) ..... 379 - 390
Syprianus Aristeus

Jurnal Penelitian Hukum
De Jure
Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/KPT/2019
Volume 20, Nomor 3, September 2020
p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Paris Agreement: Respon Terhadap Pendekatan Prinsip ***Common But Differentiated Responsibilities And Respective Capabilities*** dalam ***Kyoto Protocol***
(Paris Agreement: A Response to an Approach of Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities Principle in Kyoto Protocol) ..... 391 - 408
Amira Bilqis, Arie Afriansyah

Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
(*Optimization of Legal Aid Servicesf for Poor Communities***)** ..... 409 - 434
Ahyar Ari Gayo

Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris
(Legality of Existence of the Notary Supervisory Assembly and Notary Honor Assembly) ..... 435 - 458
Henry Donald Lbn Toruan

Perkawinan "Pada Gelahang" Serta Aspek Hukum Pembagian Harta Warisannya di Bali
(The "On The Gelaw" Marriage and The Legal Aspect of The Distribution of Heritage in Bali) ..459 - 471
Evi Djuniarti

BIODATAPENULIS
PEDOMAN PENULISAN

Jurnal Penelitian Hukum
De Jure
Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/KPT/2019
Volume 20, Nomor 3, September 2020
p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadirat Allah SWT, ***Jurnal Penelitian Hukum De Jure*** yang diterbitkan **Ikatan Peneliti Hukum Indonesia** bekerjasama dengan **Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementeraian Hukum dan HAM RI** bisa kembali menerbitkan Volume 20 Nomor 3 , Edisi September Tahun 2020.

Penerbitan ***Jurnal Penelitian Hukum De Jure*** Volume 20, Edisi September 2020 ini, memuat 10 (Sepuluh) tulisan dari berbagai institusi lembaga penelitian yang ada di Indonesia yang dalam kondisi masih dalam situasi Pandemi Covid-19. Sebagaimana diketahui bahwa sudah hampir sepuluh bulan Covid-19 melanda negeri kita ini. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTPPC19) tidak hanya melakukan pengendalian penyebaran virus SARS-CoV-2 atau penanganan dampak di sektor ekonomi, sosial maupun budaya. Penanganan juga dilakukan termasuk dalam pengamanan dan penegakan hukum di masa pandemi. Selama berlangsungnya pandemi, GTPPC19 telah melakukan upaya pengamanan dan penegakan hukum. Langkah-langkah tersebut dilakukan di bawah koordinasi dari Subbidang Pengamanan dan Penegakan Hukum GTPPC19. Pembentukan subbidang tersebut dipayungi dengan Keputusan Ketua GTPPC19 Nomor 20 Tahun 2020, tertanggal 22 Mei 2020. Terkait dengan kondisi tersebut, penegakan hukum salah satunya yang terdampak dari kondisi tersebut. Terkait dengan kondisi tersebut diatas, tentu juga penegakan hukum menjadi salah satu yang menjadi sorotan publik dengan berbagai persoalan yang terjadi. Dalam penerbitan Edisi setember ini, redaksi juga mengangkat persoalan-persolan Covid ini ditinjau dari sudut penegak hukum, misalnya Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter dalam Sistem Peradilan Pidana (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Era Covid-19). Disamping itu juga, redaksi memuat ”Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Bidang Perpajakan”, Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh yang Berkeadilan”, Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan,

Kami menyampaikan terima kasih kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada ***Jurnal Penelitian Hukum De Jure*** untuk menerbitkan hasil karyanya.

Semoga karya-karya penelti dalam penerbitan ini bermanfaat buat pembaca. Kami selalu terus menunggu karya-karya peneliti selanjutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulils dalam penerbitan ini.

Jakarta, September 2020

Redaksi

Jurnal Penelitian Hukum
De Jure
Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/KPT/2019
Volume 20, Nomor 3, September 2020
p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

HALAMAN KOSONG

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/KPT/2019
Volume 20, Nomor 3, September 2020

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Mohd. Din, Rizanizarli, Akbar Jalil

The Model for Law Enforcement on Election Crimes in Aceh Province

Law Research Journal De Jure, 2020 September; Volume 20, Number 3, Page 289-300

The purpose of this writing is to explain the reasons for the law enforcement of election criminal acts in Aceh province that are not yet just and the model for law enforcement on election crimes in Aceh province. This study is necessary because the implementation of the elections which have been implemented so far is deemed not going well, so improvements are needed in all lines related to the implementation. The data in this study were obtained through library research and field research. The data obtained were analyzed using qualitative methods. The results showed that the main factor that causes the law enforcement of election crimes to be unfair is the lack of coordination between the law enforcement agencies in Gakkumdu. There are still articles that have multiple interpretations and the short time in handling election crimes makes it difficult to find evidence and witnesses. The Law enforcement model should be Aceh Provincial Panwaslih conducts a Rakernis with Regency /City Panwaslih. In order to finalize preparations for the formation the Gakkumdu Center In Election Supervisory rank and evaluating the activities that have been done to improve optimization of law enforcement on election crimes. However, in its implementation, there are still different perceptions of existing provisions.

Keywords: violations; election crimes; gakkumdu

Farid Wajdi, Andryan

Constitutional Court of impeachment Decisions on The President's Law Status and/or The Presidential

Law Research Journal De Jure, 2020 September; Volume 20, Number 3, Page 301-314

Impeachment is not interpreted as a decline, cessation or dismissal of the President and or Vice President from his position. The decision of impeachment in the Constitutional Court as a political process does not mean that the President and or Vice-President can be dismissed because they have to remain through the MPR decision given the authority to dismiss the President and or Vice-President. This study aims to analyze the implications of the nature of the Constitutional Court's impeachment decision on the legal status of the President and or Vice President, who has been declared constitutional violations. The research method used in this study is normative juridical, that is, research in its assessment by referring to and basing on legal norms and norms. This paper is intended to look for constitutional formulations that are fundamental following the concept of the rule of law on the binding power of the Constitutional Court's impeachment decision. The ideal format of the impeachment mechanism must place the Constitutional Court in a decisive position, not just an institution that justifies the opinion of the DPR in the impeachment process.

Keywords: nature of decision; impeachment; constitutional court; legal status; president and vice president

Jurnal Penelitian Hukum
De Jure
Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/KPT/2019
Volume 20, Nomor 3, September 2020
p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

I Made Budi Arsika, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati

The Urgency of Granting Diplomatic Passport to the Members of the Parliament

Law Research Journal De Jure, 2020 September; Volume 20, Number 3, Page 315-334

The discourse of granting a diplomatic passport to Members of the Indonesian Peoples' Representatives Council brought to people's mind regarding previous political and academic debates. This article aims to identify international legal instruments and practices in legitimizing the use of diplomatic passports by state officials whose main task is not to carry out diplomatic functions, including members of parliament. Besides, it aims to analyze the legal basis for granting such a diplomatic passport in the context of Indonesia. This article reflects normative legal research that uses statutory, comparative, fact and historical approaches. This research concludes that the granting of diplomatic passports is not particularly regulated in international instruments in the field of diplomatic relations because it tends to be the domestic domain of each country. The international practice also indicates that a diplomatic passport is considered only to show a special position held by the holder because it does not automatically confer diplomatic immunity. From the perspective of Indonesian law, this concern does not yet have a strong legal basis. The most explicit rule is stipulated in the Regulation of Peoples' Representatives Council concerning the Code of Conduct. Therefore, the executive (government) does not have an obligation to fulfil the proposal.

Keywords: diplomatic passport, members of parliament, diplomatic immunity, international law

Marulak Pardede

Legal Aspect of Eradication of Corruption Criminal Act in Taxation

Law Research Journal De Jure, 2020 September; Volume 20, Number 3, Page 335-362

The purpose of this research is to identify and analyze how the criminal law enforcement against corporations as tax crime perpetrators; as well as what efforts need to be made to tackle criminal acts of corruption in the tax field. By using research methods: This type of research is descriptive analytical, normative juridical approach. Types and sources of document data or library materials obtained and analyzed; The data analysis technique is qualitative. The result of the research shows that law enforcement against corporations as tax offenders cannot be done optimally, because they are faced with a legal system that determines the success or failure of good law enforcement, namely: Legal content / material; Legal Structure; and Legal Culture. The regulation of criminal law enforcement aspects against corporations as perpetrators of criminal acts in the field of taxation has not been explicitly regulated in statutory regulations, but is only regulated in special criminal regulations. This aspect of law enforcement is faced with juridical obstacles; lex specialis principle of Taxation Legislation; often clash with tax court decisions. To overcome these obstacles, it is suggested, among others: efforts to strengthen the function and role of investigators for criminal acts of corruption; regulation of the whistleblowing system mechanism and justice collaborator in the criminal justice system; application of the mechanisms for seizure of corruptors' assets and reverse proof; application of laws and regulations in the field of anti money laundering.

Keywords: law enforcement; corruption; corporations; taxation

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/KPT/2019
Volume 20, Nomor 3, September 2020

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Suharyo

The Legal Aspect of Doctor's Notes in the Criminal Justice System (Eradication of Criminal Corruption Measures in the Time of Covid-19)

Law Research Journal De Jure, 2020 September; Volume 20, Number 3, Page 363-378

A doctor's notes is a letter from the doctor regarding the general condition of a person, whether healthy or sick. The case of H.M. Suharto, Eddy Tansil, Setya Novanto, and Bambang W. Soeharto proved that differences in perception were often misused. A COVID-19 pandemic can potentially interfere with law enforcement, especially in eradicating corruption. In the event of misuse of the doctor's notes, aside from being administratively and professionally accountable, it is possible to be criminally liable. The problem in this journal is to what extent is the strength of proof of a doctor's notes in the criminal justice system and how to find out whether the doctor's notes are genuine or fake in criminal liability. The research method used in this journal is normative juridical. Complexity colours the process and creation of a doctor's notes. The integrity of law enforcers, ranging from the National Police, Attorney General's Office, Corruption Eradication Commission, Judges, Correctional Institution, even Lawyers, are sometimes inconsistent in carrying out their profession. Potential problems will arise if law enforcers do not ask for a second opinion or establishing an independent team of doctors. As suggestions, the making of doctor's notes must be based on professional ethics, doctor's oath, and independence in accordance with the laws. The role of the Majelis Kehormatan Etika Kedokteran needs to be strengthened to maintain the professionalism of doctors. Criminal penalties for doctor and other parties who participate in the making of a doctor's note that meets criminal elements must be strictly enforced.

Keywords: doctors; criminal justice; covid-19

Syprianus Aristeus

Ideal Execution of Civil Law Based on Principles The Justice of Correlation in Efforts to Reach Simple, Fast Justice and Light Fee

Law Research Journal De Jure, 2020 September; Volume 20, Number 3, Page 379-390

The execution of civil case decisions at the normative and implementation levels often creates juridical, sociological and philosophical problems. Besides it can also be because the decision which has permanent legal force (Eintracht van gewijs de zaak) is not executable (non-executable) as the object of the case has changed, the object of the case has been sold. It is in the hands of a third party. There are two decisions against the object of the case. Which differ from each other, the object of the case has unclear boundaries; the decision is declaratory, not komdemnatoir, and so on. This research wants to examine and provide an alternative thought on how, on the one hand, the execution can be carried out following the paradigm of justice. On the other hand, the execution of the execution provides legal certainty in its correlation in order to realize a fast, simple and low-cost trial in accordance with the provisions of Article 2 paragraph (4), Article 4 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. The approach method used in this research is juridical, normative and historical, as well as finding in-concreto law. The execution that the justice seeker hopes should be carried out without having to wait long enough. It is as confirmed in Law Number 48 of 2009 Article 2 paragraph (4), Simple, Fast and Low-Cost Judicial Principles. It is time for the Supreme Court to prepare personnel who have been appointed to be the State Civil Apparatus to be able to execute decisions that have permanent legal force.

Keywords: civil court execution; simple judiciary

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/KPT/2019
Volume 20, Nomor 3, September 2020

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Amira Bilqis, Arie Afriansyah

Paris Agreement: A Response to an Approach of Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities Principle in Kyoto Protocol

Law Research Journal De Jure, 2020 September; Volume 20, Number 3, Page 391-408

The ability to deal with environmental issues between developed and developing countries often impacts the respective obligation stipulated in international agreements. The principle of Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC) as the leading principle in international environmental law is a bridge to balance the interests of the two groups. However, in international legal instruments, there are different implementations of these principles with each approach used. This study aims to analyze the application of the CBDR-RC principle in the Paris Agreement compared with its predecessor, the Kyoto Protocol. The research method in this paper is a normative juridical approach presented in analytical descriptive. The results identified that the Kyoto Protocol is a Top-Down approach agreement, where the reduction target is decided. Meanwhile, the successor, Paris Agreement is a Bottom-Up approach, where countries voluntarily submit their target of reducing emissions. The approach used by the Paris Agreement is different as a response to the evaluation of its predecessor. As a result, the level of participation in efforts to reduce emissions was drastically increased, and Annex I countries were encouraged to achieve higher reduction. Despite the fact that the Paris Agreement has resolved the Kyoto Protocol's issues, it still possesses some drawbacks. In conclusion, the transformation carried out in these two agreements has influenced the trend of emission reduction commitments in the climate change regime for developed and developing countries.

Keywords: common but differentiated responsibilities and respective capabilities; climate change; kyoto Protocol; paris agreement

Ahyar Ari Gayo

Optimization of Legal Aid Servicesf for Poor Communities

Law Research Journal De Jure, 2020 September; Volume 20, Number 3, Page 409-434

Every person in trouble with the law has the right to get legal assistance from the investigation until a court ruling has obtained permanent legal force. Providing legal assistance is part of human rights, especially for the poor. The provision of legal aid to the poor has been accommodated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Its practice is still not optimal with a variety of problems, both organizers and recipients of legal aid. The problem is, what is the problem that causes the suboptimal legal assistance for the poor? What are the strategic efforts that need to be made in providing legal aid for the poor? The aim is to find out what problems and efforts must be made so that the provision of legal aid to the poor can be optimal. This type of research is normative juridical with legislation approach and analysis approach to answer research problems. This research found a problem that caused inadequate legal assistance for the poor due to the small budget for each case, the lack of an accredited Legal Aid Organization and the lack of standardization guidelines for providing legal aid services. Then suggest to the government cq the Ministry of Law and Human Rights Humans to immediately issue the Standardization of Legal Aid Servants Guidelines as a reference for those involved in the implementation of legal aid for the poor.

Keywords: problematic; legal aid; poor communities

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/KPT/2019
Volume 20, Nomor 3, September 2020

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Henry Donald Lbn Toruan

Legality of Existence of the Notary Supervisory Assembly and Notary Honor Assembly

Law Research Journal De Jure, 2020 September; Volume 20, Number 3, Page 435-458

In UUJN Article 67, it is stated that notary supervision is carried out by the Minister. But in carrying out supervision, the Minister establishes a Notary Supervisory Council (MPN) in the area called MPD, in the province it is called MPW, at the center it is called (MPP. Each MPN member consists of 9 (nine) people, each 3 (three) people. from: elements of government, elements of notary public and elements of academia Even though the MPN has been formed, in practice there are still various legal violations committed by Notaries. The notary element takes sides with the investigated notary. Likewise, if the Notary is to be examined by law enforcers, it must obtain approval from the Notary Honorary Council (MKN), the new Notary can be examined. It becomes a question: does the delegation of authority for notary guidance and supervision to the MPN and MKN have legality? it has no legality whether the MPN and MKN need to be maintained or replaced by pengawa san from the internal Ministry of Law and Human Rights?. This writing uses a normative-empirical legal research method. In terms of administrative law, the delegation of supervisory authority does not have legality originating from the source of authority, namely delegation. Because the delegation must be delegated to an organ that is a legal entity with a statutory provision. Therefore, the establishment of this institution is only as a place of protection for notaries as mandated at the opening of UUJN point c.

Keywords: legality; existence; assembly

Evi Djuniarti

The "On The Gelaw" Marriage and The Legal Aspect of The Distribution of Heritage in Bali

Law Research Journal De Jure, 2020 September; Volume 20, Number 3, Page 459-471

Religious diversity adopted by the people of Indonesia will color the implementation of the Marriage Law. In many areas, especially for Hindus in Bali, the implementation of marriage will also be marked by the enactment of customary law, in addition to being difficult to separate between adat and religion, marriage law is also strongly influenced by family law which is still controlled by customary law. The concept of sekala-niskala is a concept that cannot be separated from the life of religious Balinese people, who always maintain harmonious relations between the real world (sekala) and the unseen world (niskala) in every aspect of their lives, including in marriage. The marriage system according to Hindu law contained in the Book of Manudharmasastra we compare it to the 'marriage system found in indigenous peoples in Bali, then we will see there are similarities between the marriage system according to Hindu law with the existing marriage system in the customary law community in Bali. The problems in writing this paper are as follows: What is the state of marriage in Bali? In relation to family law, especially marriage, Tabanan Regency is relatively "more advanced", compared to other districts in Bali. One example, marital marriage. The main factor behind the wedding couple and their families agreeing to hold a marriage at Geldhang is the concern of the inheritance left by their parents, whether in the form of responsibilities or obligations (swadharma) or rights (swadikara), no one takes care of and continues. The government is expected to make rules or guidelines in the implementation of marriage in gelahang so that it becomes knowledge that can be used as a guide for couples who are getting married.

Keywords: marriage law; gelahang; bali; inheritance

Jurnal Penelitian Hukum
De Jure
Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/KPT/2019
Volume 20, Nomor 3, September 2020
p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Mohd. Din, Rizanizarli, Akbar Jalil (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh)

Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh yang Berkeadilan

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 3, September 2020, Halaman 289-300

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan sebab penegakan hukum tindak pidana pemilu di Provinsi Aceh belum berkeadilan dan model penegakan hukum tindak pidana pemilu di Provinsi Aceh yang berkeadilan. Kajian ini menjadi perlu oleh karena pelaksanaan pemilu yang selama ini dilaksanakan dianggap masih belum berjalan dengan baik, sehingga diperlukan perbaikan dalam segala lini terkait dengan pelaksanaan tersebut. Data di dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan penegakan hukum tindak pidana pemilu tidak berkeadilan adalah kurangnya sinergi antara lembaga penegak hukum yang duduk di Gakkumdu, masih ada Pasal yang multi tafsir dan singkatnya waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu sehingga sulit mencari bukti maupun saksi. Model penegakan hukum yang dilakukan adalah Panwaslih Provinsi Aceh melakukan Rakernis dengan Panwaslih Kabupaten/ Kota dalam rangka mematangkan persiapan pembentukan Sentra Gakkumdu di jajaran Pengawas Pemilu dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang sudah dilakukan guna meningkatkan optimalisasi penegakan hukum tindak pidana pemilu meskipun di dalam pelaksanaannya masih saja terdapat persepsi yang berbeda terhadap ketentuan yang ada.

Kata kunci: pelanggaran; tindak pidana pemilu; gakkumdu

Farid Wajdi, Andryan (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan)

Sifat Putusan Impeachment Mahkamah Konstitusi terhadap Status Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 3, September 2020, Halaman 301-314

Impeachment tidak diartikan sebagai sebuah turunnya, berhentinya atau dipecatnya Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya. Putusan *impeachment* di MK sebagai proses politik tidak berarti dapat diberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden karena harus tetap melalui keputusan MPR yang diberikan kewenangan dalam memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi sifat putusan *impeachment* MK terhadap status hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah dinyatakan telah melakukan pelanggaran secara konstitusional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum. Tulisan ini dimaksudkan untuk mencari formulasi konstitusional yang bersifat fundamental sesuai dengan konsep supremasi hukum terhadap daya ikat *putusan impeachment* MK. Format mekanisme *impeachment* yang ideal tersebut harus menempatkan MK pada posisi yang menentukan, bukan hanya sekedar lembaga yang menjustifikasi pendapat DPR dalam proses *impeachment.*

Kata kunci: sifat putusan; *impeachment;* MK; status hukum; presiden dan wakil presiden

Jurnal Penelitian Hukum
De Jure
Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/KPT/2019
Volume 20, Nomor 3, September 2020
p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

I Made Budi Arsika, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati (Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali)

Urgensi Pemberian Paspor Diplomatik bagi Anggota Parlemen

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 3, September 2020, Halaman 315-334

Wacana pemberian paspor diplomatik kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengingatkan kembali publik pada perdebatan politik dan akademik yang pernah terjadi sebelumnya. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi instrumen hukum internasional dan praktik internasional dalam memberikan legitimasi terhadap penggunaan paspor diplomatik oleh pejabat negara yang tugas utamanya tidak melaksanakan fungsi diplomatik, termasuk di antaranya anggota Parlemen. Selain itu, artikel ini bermaksud menyajikan analisis dalam konteks Indonesia mengenai landasan hukum pemberian paspor diplomatik kepada anggota DPR RI. Artikel ini merefleksikan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, perbandingan, fakta, dan sejarah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian paspor diplomatik bagi anggota parlemen suatu negara tidaklah diatur secara spesifik dalam instrumen-instrumen internasional di bidang hubungan diplomatik karena cenderung merupakan ranah domestik masing-masing negara. Praktik internasional juga mengindikasikan bahwa paspor diplomatik dianggap hanya menunjukkan posisi khusus yang dimiliki oleh pemegangnya karena tidak secara otomatis memberikan imunitas diplomatik. Dalam perspektif hukum Indonesia, pemberian paspor diplomatik kepada anggota DPR RI belum sepenuhnya memiliki landasan hukum yang kuat. Adapun pengaturan paling eksplisit justru tertuang di dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Dengan demikian, pihak eksekutif (pemerintah) tidaklah memiliki kewajiban untuk memenuhi usulan tersebut.

Kata Kunci: paspor diplomatic; anggota parlemen; imunitas diplomatic; hukum internasional

Marulak Pardede (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta)

Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Bidang Perpajakan

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 3, September 2020, Halaman 335-362

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana perpajakan; serta upaya apakah yang perlu dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dalam bidang perpajakan. Dengan menggunakan metode penelitian: Jenis penelitian ini *deskriptif analitis*, pendekatan *yuridis normatif*. Jenis dan sumber data dokumen atau bahan pustaka, eroleh kemudian dianalisis; Teknik analisis data, adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana perpajakan, belum dapat dilakukan secara optimal, karena dihadapkan dengan sistem hukum yang menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum yang baik, yaitu: Isi/materi Hukum; Struktur Hukum; dan Budaya Hukum. Pengaturan aspek penegakan hukum pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam bidang perpajakan, belum diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi hanya diatur dalam peraturan tindak pidana khusus. Aspek penegakan hukum ini dihadapkan kepada kendala yuridis; asas lex specialis Peraturan Perundang-undangan Perpajakan; sering berbenturan dengan putusan peradilan pajak. Untuk menanggulangi kendala tersebut, disarankan antara lain : perlu dilakukan upaya penguatan fungsi dan peran penyidik atas tindak pidana korupsi; pengaturan mekanisme *whistleblowing system* dan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana; penerapan mekanisme perampasan aset koruptor dan pembuktian terbalik; penerapan peraturan perundang-undangan di bidang anti pencucian uang.

Kata kunci: penegakan hukum; korupsi; korporasi; perpajakan

Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Suharyo (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta)

Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter dalam Sistem Peradilan Pidana (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Era Covid-19)

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 3, September 2020, Halaman 363-378

Surat keterangan dokter merupakan bukti surat dari dokter terhadap keadaan umum seseorang dinyatakan sehat atau sakit. Kasus H.M. Soeharto, Eddy Tansil, Setya Novanto, dan Bambang W. Soeharto membuktikan bahwa perbedaan persepsi dalam surat keterangan dokter sering disalahgunakan. Pandemi Covid-19 yang terjadi dapat berpotensi mengganggu penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi. Dalam hal terjadi penyalahgunaan surat keterangan dokter, selain dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dalam profesi kedokteran, juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Permasalahan dalam jurnal ini adalah sampai dimana kekuatan pembuktian surat keterangan dokter dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana mengetahui surat keterangan dokter tersebut asli atau palsu dalam pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah yuridis normatif. Kompleksitas mewarnai proses dan pembuatan surat keterangan dokter. Integritas penegak hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan, KPK, Hakim, Lapas, bahkan Pengacara terkadang inkonsisten dalam menjalankan profesinya. Potensi permasalahan akan timbul apabila penegak hukum tidak meminta *second opinion* atau pembentukan tim independen dokter. Sebagai saran, pembuatan surat keterangan dokter harus dilandasi etika profesi, sumpah dokter, dan independensi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Peranan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran perlu diperkuat untuk menjaga profesionalitas dokter. Hukuman pidana bagi dokter dan pihak lain yang berpartisipasi dalam keluarnya Surat Keterangan Dokter yang memenuhi unsur-unsur pidana harus ditegakkan dengan tegas.

Kata kunci: dokter; peradilan pidana; covid-19

Syprianus Aristeus (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta)

Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 3, September 2020, Halaman 379-390

Eksekusi putusan perkara perdata pada tataran normatif dan implementatif sering kali menimbulkan problematika yuridis, sosiologis dan filosofis. Selain itu juga, dapat dikarenakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijs de zaak)* memang tidak dapat dieksekusi *(non eksekutable)* seperti objek perkara telah berubah, objek perkara telah dijual dan berada di tangan pihak ketiga, terhadap objek perkara ada dua putusan yang saling berbeda, objek perkara batas-batasnya tidak jelas, putusan sifatnya deklaratoir bukan komdemnatoir, dan lain sebagainya. Penelitian ini ingin mengkaji dan memberikan suatu alternatif pemikiran bagaimana di satu sisi eksekusi tersebut dapat dijalankan sesuai dengan paradigma keadilan, dan di sisi lainnya pelaksaaan eksekusi tersebut memberi kepastian hukum dalam korelasinya guna mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4), Pasal 4 Ayat (2). Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yuridis, normatif dan historis, serta menemukan hukum *in-concreto.* Eksekusi yang diharapkan oleh pencari keadilan seharusnya dapat terlaksana tanpa harus menunggu cukup lama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (4), Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Sudah saatnya Mahkamah Agung dapat menyiapkan tenaga yang telah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara untuk dapat melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata kunci: eksekusi perkara perdata; peradilan sederhana

Jurnal Penelitian Hukum
De Jure
Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/KPT/2019
Volume 20, Nomor 3, September 2020
p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Amira Bilqis, Arie Afriansyah (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok)

Paris Agreement: Respon Terhadap Pendekatan Prinsip *Common But Differentiated Responsibilities And Respective Capabilities* dalam *Kyoto Protocol*

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 3, September 2020, Halaman 391-408

Kemampuan dalam menangani permasalahan lingkungan antara negara maju dan berkembang kerap berdampak obligasi yang diatur dalam perjanjian internasional. Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDR-RC) sebagai prinsip yang memimpin dalam hukum lingkungan internasional merupakan jembatan untuk menyeimbangkan kepentingan dua kelompok negara tersebut. Namun, dalam instrumen hukum internasional terdapat implementasi yang berbeda dari prinsip tersebut dengan masing-masing pendekatan yang digunakan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa bagaimana implementasi prinsip CBDR-RC dalam *Paris Agreement* dibandingkan dengan pendahulunya yaitu *Kyoto Protocol*. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam *Kyoto Protocol* sebagai perjanjian yang menetapkan secara kaku besaran emisi yang harus direduksi diidentifikasi sebagai *Top-Down*. Sedangkan perjanjian penerusnya yaitu *Paris Agreement* sebagai perjanjian yang didasarkan atas dasar sukarela terhadap besaran emisi yang perlu dicapai diidentifikasi menggunakan pendekatan sebagai *Bottom-Up*. Pendekatan yang digunakan dari *Paris Agreement* berbeda sebagai respon dan bentuk evaluasi dari pendekatan yang digunakan dalam *Kyoto Protocol* yang berakibat tingkat partisipasi dalam usaha reduksi emisi meningkat secara drastis dan mendorong negara Annex I menargetkan reduksi yang lebih tinggi lagi. Terlepas dari kenyataan bahwa *Paris Agreement* telah menyelesaikan masalah dalam mekanisme *Kyoto Protocol*, perjanjian ini masih memiliki beberapa kekurangan. Kesimpulannya, transformasi pendekatan yang terjadi dalam kedua perjanjian ini mempengaruhi tren komitmen reduksi emisi dalam rezim perubahan iklim bagi negara maju maupun berkembang.

Kata kunci: prinsip tanggung jawab bersama tapi beda; kyoto *protocol;* paris *agreement*; perubahan iklim

Ahyar Ari Gayo (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta)

Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 3, September 2020, Halaman 409-434

Setiap orang bermasalah dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pemberian bantuan hukum, merupakan bagian dari hak asasi, khususnya bagi masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, praktiknya masih belum optimal dengan bermacam-macam problem, baik penyelenggara maupun penerima bantuan hukum. Permasalahan adalah apa problem yang menyebabkan belum optimalnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin? Apa upaya strategis yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin?. Tujuan adalah untuk mengetahui terkait dengan problem dan upaya apa yang harus dilakukan agar pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat optimal. Jenis penelitian adalah yuridis normative dengan pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menemukan problem yang menyebabkan belum optimalnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin disebabkan masih kecilnya anggaran setiap pendampingan per kasusnya, masih sedikitnya Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi serta belum adanya standarisasi pedoman pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum, sehingga menyarankan kepada pemerintah cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar segera mengeluarkan Standarisasi Pedoman Pelayan Bantuan Hukum sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Kata kunci: problematik; bantuan hukum; masyarakat miskin

Jurnal Penelitian Hukum
De Jure
Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/KPT/2019
Volume 20, Nomor 3, September 2020
p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Henry Donald Lbn Toruan (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta)

Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 3, September 2020, Halaman 435-458

Dalam UUJN Pasal 67 disebutkan bahwa pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri. Tetapi dalam melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawas : MPD, MPW, MPPN. Anggota MPN terdiri dari 9 (sembilan) orang, masing-masing 3 (tiga) orang dari: unsur pemerintah, unsur notaris dan unsur akademisi. Meskipun telah dibentuk MPN tetapi dalam praktiknya masih terjadi berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris. Dari ketiga unsur tersebut, yang berperan menentukan hasil pemeriksaan adalah unsur notaris. Maka, putusan yang dihasilkan menjadi hambar karena unsur notaris berpihak pada notaris terperiksa. Demikian juga bila Notaris hendak diperiksa penegak hukum, harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) baru Notaris bisa diperiksa. Menjadi pertanyaan: apakah pelimpahan kewenangan pembinaan dan pengawasan Notaris kepada MPN dan MKN memiliki legalitas?. Jika tidak memiliki legalitas apakah MPN dan MKN perlu dipertahankan atau digantikan dengan pengawasan dari internal Kementerian Hukum dan HAM?. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pelimpahan kewenangan pengawasan tersebut ditinjau dari hukum administrasi tidak memiliki legalitas yang berasal dari sumber kewenangan, yaitu delegasi. Karena pendelegasian harus dilimpahkan pada suatu organ berbadan hukum dengan suatu ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembentukan lembaga tersebut hanya sebagai tempat perlindungan notaris sesuai yang diamanatkan pada pembukaan UUJN point c.

Kata kunci: legalitas; keberadaan; majelis

Evi Djuniarti (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta)

Perkawinan "Pada Gelahang" Serta Aspek Hukum Pembagian Harta Warisannya di Bali

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 3, September 2020, Halaman 459-471

Keanekaragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia akan mewarnai pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Pada banyak daerah, khususnya bagi Umat Hindu di Bali, pelaksanaan perkawinan juga akan diwarnai oleh berlakunya hukum adat, di samping karena antara adat dan agama sulit dipisahkan, hukum perkawinan juga sangat dipengaruhi oleh hukum keluarga yang masih dikuasai oleh hukum adat. Konsep *sekala-niskala* merupakan konsepsi yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Bali yang relegius, yang senantiasa menjaga keharmonisan hubungan antara dunia nyata *(sekala)* dan dunia gaib *(niskala)* dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam perkawinan. Sistem perkawinan menurut hukum Hindu yang terdapat dalam kitab Manudharmasastra kita bandingkan dengan 'sistem perkawinan yang terdapat pada masyarakat adat di Bali, maka akan kita lihat ada persamaan antara sistem perkawinan menurut hukum Hindu dengan sistem perkawinan yang ada pada masyarakat hukum adat di Bali. Adapun permasalahan dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut Bagaimanakah keadaan perkawinan *pada gelahang* di Bali? Dalam hubungan dengan hukum keluarga, khususnya perkawinan, Kabupaten Tabanan terbilang relatif "lebih maju", dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Bali. Salah satu contoh, perkawinan *nyentana.* faktor utama yang melatarbelakangi pasangan pengantin dan keluarganya sepakat melangsungkan perkawinan *pada geldhang* adalah adanya kekhawatiran warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, baik yang berwujud tanggung jawab atau kewajiban *(swadharma)* maupun hak *(swadikara)*, tidak ada yang mengurus dan meneruskan. Pemerintah dirahapkan membuat peraturan atau pedoman dalam pelaksanaan perkawinan pada gelahang agar menjadi sebuah pengetahuan yang dapat dijadikan pegangan para pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

Kata kunci: hukum perkawinan; gelahang; bali; harta waris